

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI

**Sri Ayem
Fuad Ahyari
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa**

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors that influence the performance accountability of government agencies by utilizing information technology as a moderating variable. The population in this study was the Sleman District Health Office, which was 75 respondents. The type of data used is primary data through questionnaires. Data processing and analysis using the Moderation Regression Analysis (MRA) with the help of SPSS software (Statistical Product and Service Solution). Testing the data used for linear regression is a data quality test and a classic assumption test. The results of the study indicate that the clarity of the budget target, human resource capacity, and internal control affect the accountability of performance of government agencies and are strengthened by the use of information technology as a moderating variable.

Keywords : *Performance Accountability of Government Agencies*

PENDAHULUAN

Kinerja pada instansi merupakan wujud dari pemerintah yang berakuntabilitas. Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban seseorang yang diberikan kepercayaan dalam mengelola sumber daya publik dan mampu mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Untuk mencapai akuntabilitas menyeluruh dapat dilakukan dengan cara penggunaan sumber daya secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2016 pasal 13 ayat 3 menjelaskan bahwa dinas daerah provinsi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh kepala dinas dan bertanggung jawab serta mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat pemerintah kepada publik tentang kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran. Penyusunan LAKIP bertujuan untuk menggambarkan penerapan rencana strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam

meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang.

Terkait dengan kinerja tersebut hal yang menjadi sorotan ditengah masyarakat adalah ketika karyawan memberikan pelayanan pendaftaran di Puskesmas pada masyarakat tidak efektif, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dalam pendaftaran yang sudah memanfaatkan teknologi, sehingga menyebabkan masyarakat mengeluh atas pelayanan yang terkesan membingungkan. Hal ini mengindikasikan buruknya kinerja dalam memberikan arahan atau pendampingan. Saat ini rendahnya akuntabilitas disebabkan beberapa permasalahan diantaranya sasaran yang ditetapkan tidak berorientasi pada hasil, ukuran keberhasilan kurang jelas, program yang ditetapkan tidak sesuai dengan sasaran. Dalam menanggapi suatu berita yang menjelaskan aturan yang dikeluarkan BPJS tentang persalinan, membuat masyarakat panik. Selasa 7 Agustus 2018 Kepala Dinas Kesehatan Sleman Joko Hastaryo (Tribunjogja.com) mengaku akan mengkaji terlebih dahulu agar tidak mengorbankan masyarakat. Namun, Joko khawatir jika aturan mengenai persalinan tersebut malah mengorbankan keselamatan Ibu dan Anak. Dia takut aturan tersebut akan berpengaruh terhadap angka kematian ibu dan anak. Padahal saat ini Pemerintah Kabupaten Sleman tengah membuat strategi agar angka kematian Ibu dan Anak pada saat persalinan bisa menurun. Adapun jumlah kematian ibu hamil tahun 2017 berjumlah 15.549. Joko menerangkan saat ini, dari pihak Dinas Kesehatan Sleman melakukan pengkajian lebih dalam. Jika aturan tersebut dirasa berpengaruh terhadap keselamatan pasien, maka pihaknya akan segera melakukan komunikasi dengan BPJS dan menyiapkan strategi lain.

Kinerja instansi dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku atau sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya (Wiguna, 2016). Dengan aplikasi teknologi maka instansi akan mengalami perubahan sistem pelayanan, manajemen dan pelaporan, dari tradisional ke modern. Teknologi informasi berkaitan dengan pelayanan, dikarenakan hal tersebut merupakan kualitas yang utama untuk dipertimbangkan dengan tujuan tercapainya pelayanan yang semakin efektif, cepat dan akurat. Menurut Ni Made (2015) kejelasan sasaran anggaran adalah alat perencanaan yang berupa elemen sistem pengendalian manajemen yang digunakan manajer untuk melaksanakan kegiatan operasional organisasinya secara efektif dan efisien. Oleh sebab itu, sasaran anggaran daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakannya. Untuk mempermudah penyusunan anggaran sumber daya manusia dapat memanfaatkan teknologi informasi agar efektif dan efisien. Pengendalian internal instansi juga memiliki peran yang sangat penting. Tujuan adanya pengendalian internal adalah menjaga kekayaan atau asset instansi,

memeriksa ketelitian dan kebenaran data, mendorong efisiensi, dapat mematuhi kebijakan dan peraturan. Pengendalian internal yang lemah menyebabkan tidak dapat terdeteksinya kecurangan atau ketidakakuratan proses akuntansi sehingga bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten. Pengendalian internal dapat dilaksanakan secara efektif apabila menggunakan pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Inarto (Roziq, 2018) sumber daya manusia pelaksana pengelolaan aset perlu ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan. Sumber daya manusia yang tidak berkualitas akan tersingkir dan digantikan oleh sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Farizy (Roziq, 2018) menyatakan bahwa kualitas SDM perlu ditingkatkan untuk optimalisasi aset daerah. Kompetensi sumber daya manusia dalam suatu organisasi dapat dilihat dari pencapaian tujuan dan efektifitas serta efisiensi kinerja, untuk itu sumber daya manusia diharapkan dapat memanfaatkan teknologi informasi.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik pada penelitian Hanggoro Dwi Wardana Subandriyo Putra (2016) yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Terhadap Kualitas Pelayanan Di Puskesmas Pacar Keling Surabaya. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel, pemakaian tahun dan metode penelitian. Dengan demikian usulan penelitian ini diberi judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman”.

TELAAH PUSTAKA

a. Hipotesis 1 Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Putri (2017) jika kejelasan sasaran anggaran dinyatakan secara jelas maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah semakin meningkat. Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang APBN menjelaskan rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah satu tahunnya disusun secara jelas dan spesifik serta merupakan desain teknis pelaksana, strategi untuk mencapai tujuan daerah. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Teori *stewardship* menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi dengan cara maksimalisasi *utilitas principals* dan manajemen. Hasil penelitian terdahulu Putri (2017) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah. Fitriana (2018) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

H1: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

b. Hipotesis 2 Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Zuliarti (Supadmi, 2018) kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau individu untuk dapat melaksanakan fungsi-fungsi dan kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 33 tahun 2015 menjelaskan bahwa pembangunan kesehatan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Teori stewardship, yang menjelaskan tentang penata layanan yang baik dipemerintahan. Kepala instansi selaku steward memiliki fungsi sebagai pengelola sumber daya dari rakyat (principal) harus memiliki kemampuan melayani masyarakat dengan baik sesuai tugas dan kewenangannya dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa secara akuntabel dan transparan. Kemampuan seseorang atau individu dalam suatu organisasi dapat dilihat dari pencapaian tujuan dan efektivitas serta efisiensi kinerja sehingga menghasilkan output dan hasil. Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau individu untuk dapat melaksanakan fungsi-fungsi dan kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Hasil penelitian terdahulu Supadmi (2018) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

H2: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

c. Hipotesis 3 Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Wiguna (2016) pengendalian internal ialah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai. Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian intern meliputi organisasi serta semua metode dan ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam suatu perusahaan untuk melindungi harta miliknya, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No 85 Tahun 2014 pasal 1 menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Dalam suatu organisasi terdapat ketua atau kepala yang memimpin. Hal ini adanya pengawasan dalam menjalankan semua program yang telah dirancang bersama. Hasil penelitian terdahulu Wiguna (2017) menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sundari (2018) menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

H3: Pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

d. Hipotesis 4 Pemanfaatan Teknologi Memperkuat Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Kenis (Supadmi, 2018), kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan organisasi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 33 tahun 2015 pasal 1 menjelaskan bahwa pedoman penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia bertujuan untuk memberikan acuan bagi setiap satuan kerja dari tingkat institusi dalam melaksanakan penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran dalam penggunaan dana oleh pemerintah desa maka dapat mendorong terciptanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Salah satu karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggarannya. Kejelasan sasaran anggaran akan memudahkan individu untuk menyusun target dalam

anggaran program. Untuk mempermudah penyusunan maka memanfaatkan teknologi informasi sehingga dalam proses penyusunan menjadi efektif. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi akan mempermudah penyusunan anggaran sesuai sasaran program dengan memanfaatkan software yang berkaitan, sehingga adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyusunan program maupun laporan pertanggung jawaban menjadi efektif serta dapat dipertanggung jawabkan secara jelas. Hasil penelitian terdahulu Mubaroq (2017) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan pemaparan diatas, maka hipotesis yang dikembangkan adalah:

H4: Pemanfaatan teknologi memperkuat kejelasan sasaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

e. Hipotesis 5 Teknologi Informasi Memperkuat Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Khairunyah (2018) kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atau keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 45 Tahun 2014 Pasal 1 menjelaskan bahwa kompetensi adalah kemampuan kerja yang didasarkan atas pengetahuan, kecakapan, atau kemahiran kerja, dan sikap kerja, atau kualitas pribadi menjalankan tugas secara efektif dan efisien. Menurut Mubaroq (2017) pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku atau sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya.

Perkembangan teknologi informasi direspon oleh organisasi dengan mendesain sistem informasi berbasis teknologi komputer atau website. Kemampuan seseorang atau individu dalam suatu organisasi dapat dilihat dari pencapaian tujuan dan efektivitas serta efisiensi kinerja sehingga menghasilkan hasil. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi dapat memberikan fasilitas individu dalam berhubungan atau bersosialisasi melalui media sosial, sehingga pemanfaatan teknologi informasi mempermudah komunikasi dan adaptasi antar individu satu dengan yang lain serta dapat memberikan pertanggung jawaban yang logis. Hasil penelitian terdahulu Nasir (2016) pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan pemaparan diatas, maka hipotesis yang dikembangkan adalah:

H5: Teknologi informasi memperkuat kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

f. Hipotesis 6 Teknologi Informasi Memperkuat Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengendalian intern (*internal check*) yaitu suatu sistem dan prosedur yang secara otomatis dapat saling memeriksa, dalam arti bahwa data akuntansi yang dihasilkan suatu bagian atau fungsi secara otomatis dapat diperiksa oleh bagian atau fungsi lain dalam suatu usaha. Untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data, kepala dinas melakukan pengawasan memanfaatkan teknologi informasi yang sangat efektif. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No 85 Tahun 2014 pasal 3 menjelaskan pengendalian internal meliputi lingkungan penilaian resiko, kegiatan, informasi, komunikasi, pemantauan secara efektif dan efisien.

Menurut Wijana (Wiguna, 2016) pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku atau sikap individu dalam menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan memberikan manfaat bagi pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi dapat memberikan kemudahan dalam memeriksa ketelitian dan kebenaran data, sehingga dapat memberikan keyakinan dalam mempertanggungjawabkan pelaporan pada pemberi amanah. Pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan. Berdasarkan pemaparan diatas, maka hipotesis yang dikembangkan adalah:

H6: Teknologi informasi memperkuat pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

METODOLOGI PENELITIAN

a. Variabel

Dalam penelitian ini digunakan tiga macam variabel penelitian, yaitu:

1. Variabel bebas (*independent variable*) dalam penelitian ini adalah pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, kejelasan sasaran anggaran.
2. Variabel terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Variabel moderasi (*moderating variable*) dalam penelitian ini adalah pemanfaatan teknologi informasi.

b. Populasi

Dalam penelitian ini populasi yang hendak dianalisis adalah kinerja yang berada di dinas kesehatan pemerintah daerah kabupaten Sleman.

c. Sampel

Pengambilan sampel atas responden dilakukan dengan sampel *probabilitas* melalui metode *convenience sampling*. *Convenience sampling* merupakan pengambilan sampel secara nyaman dilakukan dengan memilih sampel sekehendak perisetnya

d. Sumber dan Metode Penelitian

Jenis data penelitian ini adalah data primer. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kuesioner.

e. Teknik Analisis Data

Pengelolaan data dalam penelitian ini menggunakan program SPSS (*Statistical Package for Social Scienci*). Kemudian uji interaksi atau *Moderated Regressions Analysis* (MRA) merupakan aplikasi khusus regresi linier berganda, dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi yakni perkalian dua atau lebih variabel independen.

HASIL PENELITIAN

- Hasil uji validitas ke 30 pegawai dinas hasilnya valid. Hal ini ditunjukkan bahwa nilai r hitung $>$ nilai r tabel. Nilai r tabel dengan taraf signifikan 5% yaitu 0,374.
- Hasil uji reliabel adalah hasil pengukuran dipercaya. Hal ini ditunjukkan nilai cronbach's alpha 0,950 lebih besar dari 0,6.
- Hasil uji normalitas penelitian ini nilai residual berdistribusi normal yang berarti 0,338 lebih besar dari nilai *alpha*, yaitu 0,05.
- Penelitian ini terbebas dari masalah multikolinieritas. Hal ini dibuktikan dengan nilai *tolerance* $>$ 0,10 dan nilai VIF $>$ 0,10.
- Penelitian ini lolos dari masalah heteroskedastisitas. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan dari masing-masing variabel yang berada diatas 0,05.

HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Uji Parsial (Uji T)

Tabel 1.1
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Error Std.	Beta		
1	(Constant)	,248	1,176		,211	,834
	Kejelasan Sasaran Anggaran	,712	,104	,640	6,825	,000
	Kompetensi Sumber Daya Manusia	,154	,070	,178	2,183	,032
	Pengendalian Internal	,132	,122	,109	1,082	,283

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sumber: Data primer diolah 2019

a. Pengujian Hipotesis 1

Variabel kejelasan sasaran anggaran memiliki tingkat signifikan 0,000 dan t hitung sebesar 6,825. Tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan t hitung lebih besar dari t tabel ($6,825 > 1,996$). Hal ini membuktikan bahwa H1 terdukung, sehingga dapat disimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil penelitian ini mendukung undang-undang nomor 18 tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara pasal 16 menjelaskan bahwa anggaran untuk program pengolahan subsidi digunakan secara tepat sasaran dan disesuaikan oleh kebutuhan. Hasil penelitian ini mendukung teori *stewardship*, teori ini menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi dengan cara maksimalisasi *utilitas principals* dan manajemen. Menurut Putri (2017) sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Pengujian Hipotesis 2

Variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki tingkat signifikan 0,032 dan t hitung sebesar 2,183. Tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,032 < 0,05$) dan t hitung lebih besar dari t tabel ($2,183 > 1,996$). Hal ini membuktikan bahwa H2 terdukung, sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil penelitian ini mendukung peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 33 tahun 2015 menjelaskan bahwa pembangunan kesehatan memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Hasil penelitian ini mendukung teori *stewardship*, yang menjelaskan tentang penatalayanan yang baik dipemerintahan. Kepala instansi selaku *steward* memiliki fungsi sebagai pengelola sumber daya dari rakyat (*principal*) harus memiliki kemampuan melayani masyarakat dengan baik sesuai tugas dan kewenangannya dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa secara akuntabel dan transparan. Menurut Supadmi (2018) yang menyatakan apabila semakin baik kemampuan yang dimiliki sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, maka

akuntabilitas pengelolaan dana instansi di Kota Denpasar akan semakin baik.

c. Pengujian Hipotesis 3

Variabel pengendalian internal memiliki tingkat signifikan 0,283 dan t hitung sebesar 1,082. Tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 ($0,283 > 0,05$) dan t hitung lebih kecil dari t tabel ($1,082 < 1,996$). Hal ini membuktikan bahwa H1 tidak terdukung, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Sundari (2018) menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dari hasil data responden kuesioner penelitian juga menunjukkan meskipun komitmen Pimpinan rendah dalam sistem *reward and punishment* pelaksanaan tugas sebagai bagian dari unsur pemantauan pengendalian.

B. Hasil Uji Moderasi

a. Hasil Uji Hipotesis 4

Tabel 1.2
Hasil Uji MRA

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	2.208	7.817		.282	.000
	Kejelasan Sasaran Anggaran	1.132	.623	1.018	1.817	.037
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	.322	.568	.358	.567	.035
	Kejelasan Sasaran Anggaran*Pemanfaatan Teknologi Informasi	.020	.045	.413	.446	.035

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan tabel pada 1.2 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikansi 0,035 oleh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil selisih variabel X1 dan Xm memiliki nilai yang signifikan sebesar 0,035 yang lebih kecil dari nilai alpha yaitu 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya variabel pemanfaatan teknologi informasi memperkuat kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi akan mempermudah penyusunan anggaran sesuai sasaran program dengan memanfaatkan software yang

berkaitan, sehingga adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyusunan program maupun laporan pertanggung jawaban menjadi efektif serta dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Sebaliknya jika tidak ada pemanfaatan teknologi informasi, sumber daya manusia tidak akan mengetahui kemudahan dalam penyusunan sasaran anggaran.

b. Hasil Uji Hipotesis 5

Tabel 1.3
Hasil Uji MRA

Del		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	T	
1	(Constant)	2.949	8.503		.347	.000
	Kompetensi Sumber Daya Manusia	1.085	.661	1.258	1.641	.015
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	.778	.608	.865	1.281	.024
	Kompetesi Sumber Daya Manusia*Pemanfaatan Teknologi Informasi	.049	.047	1.124	1.034	.024

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

e

Berdasarkan tabel pada 1.3 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikansi 0,024 kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil selisih variabel X2 dan Xm memiliki nilai yang signifikan sebesar 0,024 yang lebih kecil dari nilai alpha yaitu 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya variabel pemanfaatan teknologi informasi memperkuat kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi dapat memberikan fasilitas individu dalam berhubungan atau bersosialisasi melalui media sosial, sehingga pemanfaatan teknologi informasi mempermudah komunikasi dan adaptasi antar individu satu dengan yang lain serta dapat memberikan pertanggung jawaban yang logis. Sebaliknya jika tidak ada pemanfaatan teknologi informasi, sumber daya manusia tidak akan mengetahui kemudahan dalam berkomunikasi.

c. Hasil Uji Hipotesis 6

Tabel 1.4
Hasil Uji MRA

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	10.928	10.039		1.089	.000
Pengendalian Internal	.113	.780	.093	.144	.039
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.567	.730	.630	.778	.043
Pengendalian Internal*Pemanfaatan Teknologi Informasi	.046	.056	.982	.829	.041

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

Sumber: Data primer diolah 2019

Berdasarkan tabel pada 1.4 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 0,043 oleh pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil selisih variabel X3 dan Xm memiliki nilai yang signifikan sebesar 0,041 yang lebih kecil dari nilai alpha yaitu 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya variabel pemanfaatan teknologi informasi memperkuat pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi dapat memberikan kemudahan dalam memeriksa ketelitian dan kebenaran data, sehingga dapat memberikan keyakinan dalam mempertanggungjawabkan pelaporan pada pemberi amanah. Sebaliknya jika tidak ada pemanfaatan teknologi informasi, individu tidak mengetahui cara melakukan pengontrolan yang efektif.

PENUTUP

a. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dinas kesehatan kabupaten Sleman.
2. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dinas kesehatan kabupaten Sleman.

3. Pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dinas kesehatan kabupaten Sleman.
4. Pemanfaatan teknologi informasi memperkuat kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
5. Pemanfaatan teknologi informasi memperkuat kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
6. Pemanfaatan teknologi informasi memperkuat pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

b. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian, maka penelitian ini dapat diimplikasikan pada dinas kesehatan Kabupaten Sleman untuk digunakan pada evaluasi laporan kinerja pegawai (LAKIP) yang bekerja pada dinas kesehatan Kabupaten Sleman agar lebih baik lagi serta dapat mempermudah pelayanan terhadap informasi terbaru dan membantu sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas secara efektif dan efisien.

c. Keterbatasan

Dalam penelitian ini masih banyak terdapat keterbatasan yang dialami oleh peneliti, namun dalam hal ini peneliti mengharapkan keterbatasan ini tidak mengurangi manfaat yang ingin dicapai. Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Dalam penelitian ini hanya menggunakan satu sampel yaitu dinas kesehatan Kabupaten Sleman.
2. Kemungkinan timbulnya bias terhadap respon dari responden, karena adanya persepsi yang berbeda dalam menjawab semua pertanyaan yang ada dalam kuesioner sehingga menyebabkan variabel tidak terukur secara sempurna.

d. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sampel penelitian ini hanya berasal dari dinas kesehatan Kabupaten Sleman, kemungkinan hasil yang diperoleh akan berbeda apabila menggunakan sampel atau ruang lingkup yang lebih luas.
2. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar dapat menambah variabel lain yang diduga dapat mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu transparansi dan sistem pelaporan.
3. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melengkapi dengan metode penelitian lain seperti wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil penelitian yang telah diperoleh.

REFERENSI

- Aan Kurniyanta, Ahmad Roziq, R. A. S. (2018). Analisis Pengaruh Manajemen Aset, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pendapatan Dengan Optimalisasi Aset Idle Sebagai Variabel Intervening. *Bisma Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 12(1), 131–144.
- Ar, Mulyadi;Efendy, D. (2018). Pengaruh Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh). *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(2), 95–101.
- Arsini, I. K. (2017). PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL , PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI , DAN TINGKAT PROFITABILITAS TERHADAP KETEPATAN WAKTU PELAPORAN LAPORAN KEUANGAN. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 1(3).
- Azwir Nasir, R. O. (2016). PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. *Jurusan Akuntansi Universitas Riau*, 19(16), 1601–1604. <http://doi.org/10.1097/WNR.0b013e3283129790>
- Dewi, S. (2018). Kompetensi Pengelola Anggaran , Pemanfaatan Teknologi Informasi , Sistem Pengendalian Internal Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Di Kementerian Pertahanan Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 5, 26–36.
- Efrizar, R. (2017). PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, AKUNTABILITAS PUBLIK, DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL. *Jom Fekon*, 4(1), 1726–1740.
- Karya, N. M. M. C. M. (2015). PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN PENGENDALIAN AKUNTANSI DAN SISTEM PELAPORAN PADA AKUNTABILITAS KINERJA. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4(7), 1902–1917.
- Khairunsyah, Y. E. (2018). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Akuntansi (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar). *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis*, X(1), 64–78.

Menteri, P. (2016). Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014, 1–6.
<http://doi.org/10.1016/j.metabol.2009.10.012>

Mubaraq, H. (2017). PENGARUH KETAATAN PADA PERUNDANG-UNDANGAN, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi*, 4(2), 1–32.

Peraturan Menteri. (2014). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, 1–11.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014. (2014). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, 1–11.

Putri, R. A. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Online Mahasiswa*, 4(1), 2820–2834.

Reyhan Hady Fauzan. (2017). PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI, SISTEM PELAPORAN DAN PENERAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP). *JOM Fekon*, 4(1), 1122–1136.

Riska Dwi Fitriana, Nur Hidayati, M. C. (2018). KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI, DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 10(01), 32–45. <http://doi.org/10.1186/1476-4598-10-45>

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

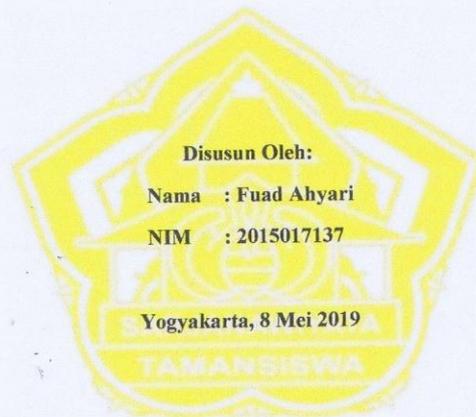
Supadmi, N. ., & Suputra, D. . D. (2018). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Keuangan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Dan Pariwisata*, 13(2), 132–145. Retrieved from <http://www.jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/pariwisata/article/view/383/33>

Wiguna, M. (2016). Pengaruh Teknologi Informasi, Pengendalian Intern, Gaya Kepemimpinan dan Good Governance Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ekonomi*, 24, 85–104.

HALAMAN PERSETUJUAN

PUBLIKASI

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DENGAN PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Sleman)**



Dosen Pembimbing



Sri Ayem, SE., M.Sc., Ak., CA., ACPA

NIY. 7312323